

## EVALUASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) PADA SEKOLAH MODEL LAMPUNG TIMUR

Elvina Maya Puspa<sup>1</sup>, Agus Sutanto<sup>2\*</sup>, Bambang Suhada<sup>3</sup>

<sup>1,2\*,3</sup> Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung, Indonesia

E-mail: [elvina.taher15@gmail.com](mailto:elvina.taher15@gmail.com)<sup>1)</sup>

### Abstrak

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Propinsi Lampung mengembangkan satuan pendidikan yang dipilih untuk menjadi sekolah model didalam menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang harapannya dapat dijadikan contoh oleh satuan pendidikan yang lain didalam menerapkan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri. Fokus dari penelitian kualitatif ini adalah: (a) Bagaimana sosialisasi Permendikbud No. 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah kepada warga sekolah model dan sekolah imbas, (b) Bagaimana implementasi (SPMI) di Sekolah Model oleh Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS), (c) Bagaimana peran kepala sekolah memfasilitasi TPMPS didalam mengimplementasikan SPMI, (d) Bagaimana tingkat efektifitas kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Fasda di sekolah model, (e) Bagaimana peran dan tanggungjawab Dinas Pendidikan Kabupaten melalui Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) di dalam menjalankan fungsi pembinaan, pembimbingan, pendampingan serta supervisi terhadap pelaksanaan SPMI di sekolah model. Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa: (a) Kegiatan sosialisasi oleh TPMPS disetiap sekolah model terhadap warga sekolah sudah berjalan dengan baik, terjadwal dan melibatkan seluruh anggota TPMPS, (b) Implementasi SPMI oleh TPMPS yang meliputi tahap pemetaan mutu, perencanaan program pemenuhan mutu, pelaksanaan program pemenuhan mutu, evaluasi dan monitoring serta penetapan standar baru sebagai bentuk tahap tindak lanjut dari pelaksanaan program secara umum sudah dapat berjalan sesuai dengan aturan dari Permendikbud No.28 Tahun 2016, jika mungkin ada kendala dan kelemahan itu karena program perencanaan pemenuhan mutu yang dibuat oleh TPMPS belum dapat masuk pada RKAS sehingga berdampak belum maksimalnya pelaksanaan program pemenuhan mutu, (c) peran kepala sekolah model dalam memfasilitasi TPMPS melaksanakan implementasi SPMI sudah berjalan baik, hanya perlu ditingkatkan dalam hal melibatkan pihak dinas pendidikan dan unsur masyarakat melalui komite sekolah, (d) peran Fasda sudah cukup efektif didalam menjalankan kegiatan pendampingan di sekolah model dan (e) peran serta tanggungjawab dinas pendidikan kabupaten melalui Tim Penjaminan Mutu pendidikan Daerah (TPMPD) sampai dengan selesainya penelitian ini belum begitu kelihatan peran sertanya dalam menjalankan Sistem penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

**Kata Kunci:** Evaluasi, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sekolah Model.

### Abstract

*The Lampung Province Education Quality Assurance Institution (LPMP) has developed an educational unit chosen to become a model school in implementing the Internal Quality Assurance System (SPMI) which is hoped to be used as an example by other educational units in implementing education quality assurance independently. The focus of this qualitative research is: (a) How does the socialization of Permendikbud No. 28 of 2016 concerning the Quality Assurance System for Primary and Secondary Education to members of model schools and impact schools, (b) How is the implementation (SPMI) in Model Schools by the School Education Quality Assurance Team (TPMPS), (c) How is the role of the principal in facilitating TPMPS in implementing SPMI, (d) What is the level of effectiveness of assistance activities carried out by Fasda in model schools, (e) What are the roles and responsibilities of the District Education Office through the Regional Education Quality Assurance Team (TPMPD) in carrying out the functions of guidance, mentoring, mentoring and supervision of implementation of SPMI in model schools. Based on the results of the analysis in this study, it is concluded that: (a) The socialization activities by TPMPS in each model school to school members have been going well, are scheduled and involve all TPMPS members, (b) Implementation of SPMI by TPMPS which includes the quality mapping*

*stage, program planning fulfillment of quality, implementation of quality compliance programs, evaluation and monitoring as well as setting new standards as a form of follow-up phase of program implementation in general can run according to the regulations of Permendikbud No.28 of 2016, if possible there are obstacles and weaknesses because of the compliance planning program. the quality made by TPMPS has not been able to enter the RKAS so that the impact on the implementation of the quality compliance program has not been maximized, (c) the role of the model school principal in facilitating TPMPS in implementing the SPMI has been going well, it only needs to be improved in terms of involving the education office and community elements through the committeeschools, (d) the role of Fasda has been quite effective in carrying out assistance activities in model schools and (e) the role and responsibilities of the district education office through the Regional Education Quality Assurance Team (TPMPD) until the completion of this research has not been so visible that its participation in implementing the guarantee system External Quality (SPME).*

**Keywords:** *Evaluation, Internal Quality Assurance System (SPMI), Model School.*

## **PENDAHULUAN**

Penjaminan Mutu pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu.

Terbitnya Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (SPMPDM) memberikan penjelasan teknis tentang penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan yang memuat ketentuan umum, fungsi dan tujuan SPMPDM, pembagian tugas dan wewenang, pemantauan dan evaluasi, sanksi dan ketentuan penutup.

Dalam rangka mendorong tersosialisasinya Permendikbud No. 28 tahun 2016 serta ikut mengawal agar sistem penjaminan mutu internal dapat diimplementasikan di setiap satuan pendidikan khususnya di daerah Propinsi Lampung, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya LPMP Lampung menyelenggarakan pembinaan terhadap beberapa sekolah terpilih untuk dijadikan sebagai sekolah model yang mampu menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan harapannya setiap sekolah model yang telah dibina dan sekaligus dibiayai melalui dana bantuan pemerintah dapat mengimbaskan penerapan sistem penjaminan mutu internal ke satuan pendidikan yang lainnya.

Sekolah model adalah sekolah yang ditetapkan dan dibina oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) untuk menjadi sekolah acuan bagi sekolah lain di sekitarnya dalam penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

### **Fokus Penelitian**

- a. Bagaimana bentuk-bentuk kegiatan sosialisasi Permendikbud No. 28 tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, kepada warga sekolah model?
- b. Bagaimana upaya yang dilakukan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) didalam melaksanakan keseluruhan tahapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)?
- c. Bagaimana peran yang seharusnya dilakukan oleh Kepala Sekolah terhadap TPMPS dalam mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal sesuai dengan tugasnya?
- d. Bagaimana tingkat efektifitas kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh fasilitator daerah (Fasda) di sekolah model?

- e. Bagaimana proses pembinaan, pembimbingan, pendampingan supervisi dan evaluasi dari Tim penjaminan Mutu Daerah (TPMPD), terhadap pelaksanaan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Internal (SPMI) di sekolah model?

## **Tinjauan Pustaka**

Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang ditetapkan pada tanggal 25 September 2009, menyebutkan bahwa “Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan”

Menurut Barnawi, M.Arifin (2017: 25) mengatakan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari sistem peningkatan mutu, yang mencakup dua kegiatan besar yaitu: pertama, peningkatan mutu yang dilandasi dengan target mutu yang sekolah harapkan. Kedua, mengukur mutu pencapaian kinerja untuk mengetahui tingkat pemenuhan standar berdasarkan target program yang telah ditetapkan. Apabila sistem ini dijalankan dengan baik, lembaga pendidikan akan terbiasa dengan budaya peningkatan mutu. Dari penjelasan diatas, dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Pengertian Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu.

Sesuai dengan isi Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No. 28 Tahun 2016, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah sistem penjaminan mutu yang dilakukan oleh seluruh komponen dalam satuan pendidikan. Pelaksanaan SPMI dimaksudkan agar pemenuhan mutu dapat direncanakan, dan dievaluasi secara internal oleh satuan pendidikan.

Agar budaya mutu dapat diciptakan disetiap satuan pendidikan, maka dibutuhkan sebuah proses penjaminan mutu secara internal yang digerakkan oleh orang atau sekelompok orang yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan proses kegiatan penjaminan mutu tersebut, hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ridwan A. Sani Dkk (2018: 9) menyatakan bahwa “Upaya menjamin mutu sebuah satuan pendidikan harus dilakukan dengan menerapkan manajemen mutu atau sistem penjaminan mutu. Kepala sekolah harus membentuk sebuah tim yang membantunya dalam melakukan penjaminan mutu, karena sebuah proses pendidikan merupakan proses yang kompleks”

Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) adalah “Sekelompok orang yang ditugaskan oleh kepala sekolah untuk melakukan tugas pelaksanaan proses penjaminan mutu pendidikan secara internal di tingkat sekolah”. Tim penjaminan mutu pendidikan sekolah tersebut paling sedikit terdiri atas: (1) perwakilan pimpinan sekolah; (2) perwakilan guru; (3) perwakilan tenaga kependidikan; dan (4) perwakilan komite sekolah. TPMPS akan dapat bekerja secara maksimal jika kepala sekolah selaku top manager disebuah lembaga pendidikan mampu mengorganisir tim tersebut, hal ini sesuai

dengan pendapat M. Ihsan Dacholfany (2017: 6) bahwa “Dalam sebuah organisasi, peranan sumber daya manusia sangat urgent dan penting. Peran sumber daya manusia ini akan maksimal jika dikelola dengan baik. Pimpinan lembaga pendidikan sebagai top leader dalam lembaga sekolah mempunyai peran sentral dalam pengelolaan personalia sehingga sangat penting bagi pimpinan lembaga pendidikan untuk memahami dan menerapkan pengelolaan personalia dengan baik dan benar”

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2016, Pasal 11 Ayat (4), tugas dari tim penjaminan mutu satuan pendidikan (TPMPS) adalah:

- a. Mengorganisasikan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat satuan pendidikan;
- b. Melakukan pembinaan, pengembangan, pendampingan, dan supervisi terhadap pelaku pendidikan di satuan pendidikan dalam pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan;
- c. Melaksanakan pemetaan mutu pendidikan berdasarkan data mutu pendidikan di satuan pendidikan
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan ; dan
- e. Memberikan rekomendasi strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kepada kepala satuan pendidikan.

Sekolah model adalah sekolah yang ditetapkan dan dibina oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) untuk menjadi sekolah acuan bagi sekolah lain di sekitarnya dalam menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Sekolah model menerapkan seluruh siklus penjaminan mutu pendidikan secara sistematis, holistik, dan berkelanjutan, sehingga budaya mutu tumbuh dan berkembang secara mandiri pada sekolah tersebut.

Keberhasilan sekolah memberikan layanan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh peserta didik melalui penerapan SPMI sangat tergantung pada komitmen dan kesungguhan kepala sekolah dan warga sekolah terutama dari peran serta dari Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) dalam menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Melalui program sekolah model ini sesungguhnya Kementerian Pendidikan dan kebudayaan telah menunjuk sekolah-sekolah yang dijadikan piloting dalam menerapkan sistem penjaminan mutu internal yang selanjutnya pembinaan sekolah-sekolah model tersebut diamanatkan kepada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). Harapannya sekolah yang sudah dibina ini mampu mengimbaskan kepada sekolah lain bagaimana mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal.

### **Deskripsi Penelitian**

Selanjutnya untuk menggambarkan upaya dari TPMPS dalam menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Sekolah Model jenjang SMP kabupaten Lampung Timur, dapat dirumuskan tujuan secara rinci, sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan upaya Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) Model didalam melakukan sosialisasi Permendikbud No. 28 Tahun 2016 kepada warga sekolah model dan sekolah imbas.

- b. Untuk mendeskripsikan upaya Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) Model didalam menerapkan siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
- c. Untuk mendeskripsikan peran kepala sekolah model terhadap TPMPS dalam mengimplementasikan SPMI.
- d. Untuk mendeskripsikan apakah proses pendampingan yang dilakukan oleh Fasilitator daerah (Fasda) di sekolah model sudah sesuai dengan juknis dari LPMP Lampung.
- e. Untuk mendeskripsikan upaya dan peran Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) didalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) sesuai dengan Permendikbud No. 28 tahun 2016.

#### **METODE PENELITIAN (15%)**

Menurut Yanuar Ikbar (2014: 105) Metode penelitian adalah suatu pembelajaran tentang metode ilmiah yang meliputi penetapan masalah, premis, hipotesis, tujuan, kegunaan, tinjauan pustaka, metode penelitian, pembahasan hasil penelitian, dan cara menarik kesimpulan yang bertujuan memperbaiki prosedur dan kriteria baku dalam penelitian ilmiah, selanjutnya menurut Sugiyono (2018: 210) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian, kualitatif lebih menekankan *makna dan keunikan* daripada *generalisasi*. sementara menurut Suharsimi Arikunto (2007: 222) penelitian evaluasi dapat diartikan suatu proses yang dilakukan dalam rangka menentukan kebijakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan nilai-nilai positif dan keuntungan suatu program, serta mempertimbangkan proses serta teknik yang telah digunakan untuk melakukan suatu penelitian. Sugiyono (2018: 1) penelitian evaluasi digunakan untuk mengetahui apakah suatu program atau aktivitas telah mencapai tujuan yang ditetapkan, dengan alasan antara lain:

1. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, hal ini dapat dilihat dari cara mengumpulkan dan merekap data dengan membuat penjelasan se jelas-jelasnya. dengan pendekatan induktif, yaitu penelitian yang dimulai dari data atau gejala yang ada dilapangan yang kemudian memunculkan teori.
2. Penelitian ini berfokus pada makna yang terdapat dalam suatu fenomena yang teliti, yang dapat digali dari persepsi objek penelitian tentang upaya yang dilakukan oleh Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) di dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di sekolah model dan mengutamakan akan pentingnya proses penelitian yang berjalan. Bukan hanya mengacu pada hasil yang ingin dicapai.

Dalam penelitian ini, peneliti memperhatikan dan menelaah fokus fenomena yang akan diteliti, dengan melihat berbagai aspek subjektif dari perilaku objek. Selanjutnya peneliti akan melakukan penggalan data berupa bagaimana pemaknaan objek dalam memberikan arti terhadap fenomena terkait.

Subjek dalam penelitian ini adalah Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah Model (TPMPS), sedangkan fokus yang diteliti adalah upaya Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) dalam menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di sekolah model. Dengan jumlah sekolah model jenjang SMP di kabupaten Lampung Timur berjumlah 7 sekolah, karena terbatasnya kondisi dan kemampuan yang ada pada peneliti, maka dalam penelitian ini hanya

akan diteliti terhadap 5 (lima) sekolah model, dengan demikian terdapat 5 (lima) Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) di jenjang SMP.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN (70%)**

Pembahasan hasil penelitian difokuskan dalam 5 (lima) hal, yaitu; (1) upaya yang dilakukan oleh TPMPS didalam melaksanakan sosialisasi Permendikbud No. 28 tahun 2016 (2) Upaya yang dilakukan oleh TPMPS didalam menajalankan siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) (3) Peran kepala sekolah dalam memfasilitasi TPMPS didalam mengimplementasikan siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) (4) Untuk mengetahui efektifitas pendampingan yang dilakukan oleh Fasilitator Daerah (Fasda) didalam melakukan pendampingan di sekolah model (5) Untuk mengetahui peran Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) didalam menjalankan tupoksinya sesuai Permendikbud No. 28 Tahun 2016.

### **Kegiatan Sosialisasi Permendikbud No. 28 tahun 2016 yang dilakukan oleh TPMPS.**

Berdasarkan hasil wawancara terhadap seluruh responden di 5 (lima) sekolah model tentang bentuk-bentuk kegiatan sosialisasi Permendikbud No. 28 tahun 2016, diperoleh gambaran hasil penelitian sebagai berikut

Tabel 1. Hasil kegiatan Sosialisasi

Nama Sekmod	Bentuk – Bentuk Sosialisasi								Keterangan
	Sistem Penjaminan Mutu (SPMI dan SPME)		SK. Dan Struktur TPMPS		Rapor Mutu dan Siklus SPMI		Standar Nasional Pendidikan (SNP)		
	S	B	S	B	S	B	S	B	
SMPN 1 Sekampung Udik	√		√		√		√		Ke 5 sekolah model sudah melakukan sosialisasi Permendikbud No.28 Tahun 2016. Indikatornya sudah memiliki SK TPMPS dan Struktur Organisasi.
SMPN 1 Marga Sekampung	√		√		√		√		
SMPN 2 Batanghari	√		√		√		√		
SMPN 1 Bumi Agung	√		√		√		√		
SMPN 1 Way Bungur	√		√		√		√		

**Keterangan:** S= Sudah, B= Belum

Dari tabel diatas terlihat bahwa sosialisasi telah dilakukan oleh seluruh sekolah model, yang berkaitan dengan (1) Sistem penjaminan Mutu Internal, (2) Pemetaan mutu melalui pembacaan rapor mutu sekolah dan siklus SPMI, (3) Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang TPMPS serta Struktur Organisasi TPMPS sudah dapat berjalan dengan baik , semua sekolah model telah memiliki SK. Kepala Sekolah tentang TPMPS beserta struktur organisasinya, hal ini sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan dengan kode Ob. K1,2,3,4,5/I.

Tetapi pada indikator adanya anggaran khusus untuk biaya operasional TPMPS dalam RKAS nya belum ada yang mengalokasikan untuk biaya operasional. Hal lain yang menjadi temuan dalam penelitian ini adalah banyaknya tim-tim lain disekolah yang belum terintegrasi kedalam wadah TPMPS, sehingga terjadinya beban kerja yang besar dan proses pengelolaan sekolah menjadi tumpang tindih. Hal ini terlihat di hasil observasi pada indikator “terintegrasi dengan tim-tim lain”

Sosialisasi Permendikbud No. 28 tahun 2016 secara umum telah dilakukan oleh sekolah model dengan melibatkan seluruh guru dan perwakilan sekolah imbas sesuai ketentuan. Hal-hal yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi terdiri dari (1) tentang isi Permendikbud No. 28 Tahun 2016, (2) tentang pengertian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), (3) Struktur Organisasi TPMPS), (4) Tugas TPMPS, (5) Siklus atau tahapan SPMI, (6) Membaca Rapor Mutu Sekolah dan melakukan pemetaan mutu sekolah.

### **Upaya Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) dalam melaksanakan siklus SPMI.**

Upaya yang dilakukan TPMPS dalam rangka mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. Kegiatan yang dilakukan TPMPS

Nama Sekmod	Kegiatan yang dilakukan TPMPS								Keterangan
	Semua anggota TPMPS terlibat dalam proses pemetaan mutu		Semua anggota TPMPS terlibat dalam proses perencanaan mutu		Semua anggota TPMPS terlibat dalam proses pelaksanaan pemenuhan mutu		Seluruh anggota Tim Auditor terlibat dalam proses moneva		
	S	B	S	B	S	B	S	B	
SMPN 1 Sekampung Udik		√		√	√		√		Upaya TPMPS dalam meng - implementasikan SPMI sudah berjalan baik. Ada 2 sekmod yang belum maksimal
SMPN 1 Marga Sekampung	√		√		√		√		
SMPN 2 Batanghari		√		√	√		√		
SMPN 1 Bumi Agung	√		√		√		√		
SMPN 1 Way Bungur	√		√		√		√		

**Keterangan:** S= Sudah, B= Belum

Berdasarkan tumuan data hasil penelitian tentang bagaimana upaya TPMPS dalam rangka mengimplementasikan tahapan/siklus SPMI secara garis besar dapat berjalan dengan baik, terdapat 2 (dua) sekolah yaitu SMPN 1 Sekampung Udik dan SMPN 2 Batanghari yang pada siklus kegiatan proses pemetaan mutu , proses perencanaan pemenuhan mutu dan proses kegiatan pemenuhan mutu tidak semua anggota tim terlibat, hanya ada beberapa anggota yang hadir, hal ini sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan dengan kode Ob.T1,3 / II.

Hal lainnya yang dapat disampaikan sesuai data yang diperoleh adalah Tim Auditor Internal dari ke 5 (lima) sekolah model tersebut belum melaksanakan tugas monitoring dan dan evaluasi (moneva) setelah selesainya kegiatan pemenuhan mutu, hal ini terlihat pada hasil observasi dengan kode Ob. T 1,2,3,4,5/II pada indikator “seluruh anggota tim audit terlibat dalam proses monitoring dan evaluasi”. Hal ini terjadi

disebabkan kurangnya pemahaman tim audit internal tersebut terhadap tugas pokok dan fungsi sebagai anggota tim audit internal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan TPMPS.

**Peran Kepala Sekolah Model terhadap Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) dalam mengimplementasikan SPMI.**

Dari data yang diperoleh, maka dapat digambarkan peran kepala sekolah sesuai dengan tupoksinya sebagai berikut:

Tabel 3. Peran Kepala Sekolah dalam mengimplementasikan SPMI

Nama Sekmod	Peran Kepala Sekolah								Keterangan
	Membuat SK. TPMPS		Memberikan Fasilitas kepada TPMPS Dalam melakukan SPMI		Memiliki anggaran untuk operasional TPMPS di RKAS		Melibatkan pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan siklus SPMI		
	S	B	Y	T	Y	T	Y	T	
SMPN 1 Sekampung Udik	√		√		√		√		Terdapat 2 sekmod peran kepala sekolah belum maksimal dalam hal melibatkan pemangku kepentingan
SMPN 1 Marga Sekampung	√		√		√		√		
SMPN 2 Batanghari	√		√			√		√	
SMPN 1 Bumi Agung	√		√		√		√		
SMPN 1 Way Bungur	√		√		√			√	

**Keterangan:** S= Sudah, B= Belum, Y= Ya, T=Tidak

Sesuai dengan peran dan tanggungjawabnya sebagai manajer, maka sudah barang tentu keterlibatan kepala sekolah sangat menentukan berhasil tidaknya program pendampingan sekolah model. Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh gambaran bahwa dari 5(lima) sekolah model terdapat 3 sekolah model yang kepala sekolahnya telah melakukan kegiatan dalam bentuk (1) Membuat SK. TPMPS, (2) memberikan fasilitas kepada TPMPS untuk melaksanakan siklus SPMI, (3) menyiapkan anggaran diluar yang diberikan oleh pihak LPMP dari dana sekolah (BOS), (4) melibatkan pemangku kepentingan dalam hal ini Dinas Pendidikan dan komite sekolah. Tetapi ada 2 (dua) sekolah model yang kepala sekolahnya belum mampu melaksanakan peran nya dalam hal Menyiapkan (1) anggaran khusus dari dana BOS untuk kegiatan pendampingan sekolah model dan (2) belum melibatkan pemangku kepentingan yaitu pihak dinas pendidikan dan komite sekolah, yaitu SMPN 2 Batanghari dan SMPN 1 Way Bungur.

**Tingkat efektifitas pelaksanaan pendampingan oleh Fasilitator Daerah (Fasda) terhadap sekolah model.**

Berdasarkan data yang diperoleh, ditemukan hal-hal sebagai berikut:

Tabel 4. Kegiatan Fasilitator Daerah terhadap Sekolah Model

Nama Sekmod	Kegiatan yang dilakukan Fasilitator Daerah (Fasda)								Keterangan
	Bimtek SPMI		Menyampaikan Materi (Jelas, bisa dipahami, jelas)		Waktu pelaksanaan kegiatan pendampingan Sekmod		Efektifitas kegiatan pendampingan		
	S	B	J	TJ	sesuai	tidak	efektif	tidak	
SMPN 1 Sekampung Udik	√		√		√		√		Ada 2 sekmod yang menyatakan bahwa waktu proses pendamping-an tidak tepat pelaksanaannya
SMPN 1 Marga Sekampung	√		√		√		√		
SMPN 2 Batanghari	√		√			√	√		
SMPN 1 Bumi Agung	√		√			√	√		
SMPN 1 Way Bungur	√		√		√		√		

**Keterangan:** S= Sudah, B= Belum, J= Jelas, TJ= Tidak Jelas

Dari hasil kegiatan wawancara dan observasi langsung ke 5 (lima) sekolah model secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut : bahwa pelaksanaan pendampingan sekolah model oleh Fasilitator daerah (Fasda) sudah berjalan dengan baik sesuai ketentuan dan sudah cukup efektif hal ini terlihat dari capaian kegiatan yang dapat selesai tepat waktu sesuai dengan yang disediakan oleh pihak LPMP. Ada 2 (dua) sekolah yang menjawab berbeda dengan 3 (tiga) sekolah model yang lainnya yaitu masalah waktu pelaksanaan pendampingan yang menurut mereka kurang tepat karena diadakan di pertengahan tahun, seharusnya pelaksanaan pendampingan dilaksanakan di awal tahun sehingga semua program dapat dimasukkan kedalam anggaran sekolah (RKAS).

### Proses pembinaan, pembimbingan, pendampingan supervisi dan evaluasi dari Tim Penjaminan Mutu Pendidikan daerah (TPMPD), terhadap pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Internal (SPMI) di sekolah model.

Dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilaksanakan di 5 (lima) sekolah model terhadap peran TPMPD terhadap pelaksanaan implementasi SPMI di sekolah model oleh TPMPD, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 5. Peran TPMPD

Nama Sekmod	Peran TPMPD								Keterangan
	Melakukan sosialisasi tentang SPME		Melakukan Pembinaan, pembimbingan dan pendampingan		Melakukan supervisi dan moneva		Melakukan program tindak lanjut terhadap sekmod		
	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	
SMPN 1 Sekampung Udik		√		√		√		√	Secara garis besar peran TPMPD belum dapat menjalankan fungsinya didalam melakukan
SMPN 1 Marga Sekampung		√		√		√		√	
SMPN 2 Batanghari		√		√		√		√	
SMPN 1 Bumi Agung		√		√		√		√	
SMPN 1 Way Bungur		√		√		√		√	

									pendampingan di lima sekmod
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------

**Keterangan:** Y= Ya, T= Tidak

Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) yang memiliki kewenangan dan bertanggungjawab (a) melakukan pembinaan (b) pembimbingan (c) pendampingan (d) pengawasan, dan (e) pengendalian satuan pendidikan dalam pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) khususnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi ternyata sampai dengan dilakukan penelitian ini belum terlihat peran TPMPD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab berkaitan dengan implementasi sistem penjaminan mutu internal di satuan pendidikan. Dari ke 5(lima) sekolah model yang diteliti belum ada satu dokumenpun yang menunjukkan peran serta keterlibatan TPMPD, hal ini sesuai dengan hasil wawancara, observasi serta studi dokumentasi yang dilakukan dengan kode W.T.1.2.3.4.5/VII dan Ob.T.1.2.3.4.5/VII juga berdasarkan studi dokumentasi dengan kode Dk. T.1.2.3.4.5/VII.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN (5%)**

Berdasarkan data dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan hal- hal sebagai berikut :

1. Sosialisasi Permendikbud No. 28 Tahun 2016 sudah dilaksanakan oleh TPMPS terhadap anggota tim penjaminan mutu sekolah model dengan baik dalam bentuk sosialisasi dan bimtek secara terjadwal.
2. Kegiatan Implementasi Sistem penjaminan Mutu Internal (SPMI), Siklus atau tahapan sistem penjaminan mutu, yang terdiri dari (a) Pemetaan mutu, (b) Perencanaan program pemenuhan mutu, (c) Pelaksanaan kegiatan pemenuhan mutu, (d) Kegiatan Evaluasi dan Monitoring, (e) Penetapan standar baru. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan implementasi SPMI oleh TPMPS sudah dapat berjalan dengan baik meskipun ada 2 (dua) sekolah model yang belum maksimal, hal ini semata-mata disebabkan tidak adanya dana khusus yang disiapkan oleh sekolah. Biaya operasional kegiatan sepenuhnya hanya bersumber dari dana bantuan pemerintah pusat melalui LPMP Lampung.
3. Peran kepala sekolah terhadap TPMPS dalam mengimplementasikan SPMI. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah model sudah dapat memberikan kontribusi yang baik kepada TPMPS sehingga tim dapat melaksanakan semua tahapan penjaminan mutu disekolahnya, kelemahan yang masih ada adalah kurangnya kemampuan kepala sekolah melibatkan pemangku kepentingan untuk terlibat aktif dalam kegiatan penjaminan mutu di sekolahnya. Pihak dinas pendidikan kabupaten dan ketua komite sekolah hanya hadir pada saat acara pembukaan kegiatan pendampingan setelah itu pada kegiatan selanjutnya mereka tidak pernah bisa ikut terlibat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh TPMPS.
4. Kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Fasilitator Daerah (Fasda) berdasarkan hasil wawancara, observasi dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa proses pendampingan sudah berjalan dengan baik sesuai juknis yang sudah ditetapkan oleh pihak LPMP Lampung. Jika ada kendala adalah waktu pendampingan yang kurang tepat, karena dibulan Juli , Agustus sekolah sedang banyak menghadapi kegiatan

awal tahun pelajaran, sehingga dapat menyebabkan kurang efektifnya kegiatan pendampingan.

5. Peran Penjaminan Mutu Daerah (TPMPD) terhadap Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di satuan pendidikan. Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara umum Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) Kabupaten Lampung Timur sampai dengan selesainya pelaksanaan program kegiatan sekolah model ternyata belum dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap pelaksanaan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di 5 (lima) sekolah model. Sesuai dengan tugas yaitu : melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI Dikdasmen pada pendidikan dasar.

### **REKOMENDASI**

1. Sebaiknya seluruh anggota Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) terlibat aktif didalam implementasi siklus penjaminan mutu sesuai dengan tugas yang ada di SK. Kepala Sekolah tentang TPMPS.
2. Sebaiknya setiap sekolah memasukkan semua program perencanaan pemenuhan mutu dapat dianggarkan melalui RKAS, sehingga pelaksanaan program pemenuhan mutu dapat berjalan sesuai dengan rencana.
3. Waktu kegiatan pendampingan sekolah model dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) diupayakan dilaksanakan diawal tahun, sehingga sekolah dapat menganggarkan kegiatan operasional TPMPS melalui dana BOS dalam RKAS.
4. Sebaiknya sekolah menganggarkan biaya operasional Tim Penjaminan Mutu pendidikan sekolah (TPMPS) melalui RKAS, sehingga TPMPS dapat bekerja secara maksimal karena didukung dengan biaya operasional yang diperlukan.
5. Pemerintah daerah melalui Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) melakukan sosialisasi Permendikbud No. 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan yang belum mendapatkan pengimbasan dari sekolah model yang ada.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto Suharsimi. (1989). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Proyek Pengembangan LPTK.
- A Sani, Ridwan, dkk . (2018). *Sistem Penjaminan Mutu Internal*. Tangerang: Penerbit Tsmart Printing
- Bagastawa Saptadi. *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategis*. Yogyakarta: Penerbit Amara Book.
- Barnawi, M. Arifin. (2017). *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*. Jakarta: Penerbit Ar-Ruzz Media.
- Budiastuti, Dyah. Agustinus Bandur. (2018). *Validitas Dan Reliabilitas Penelitian*. Edisi Asli . Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.

- Dacholfany, M. Ihsan. (2017). *Inisiasi Strategi Manajemen Lembaga Pendidikan Islam Dalam Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia Islami Di Indonesia Dalam Menghadapi Era Globalisasi*. Diakses tanggal 24 Maret 2020, dari jurnal At-Tajdid Fai UM Metro, Issn 2548-5784, E-Issn : 2549-2101 1 (01), 1-8
- Damayanti, Stovika Eva dan Udik Budi Wibowo. (2014). *Evaluasi Porgram Pendidikan Karakter di SD Kabupaten Kulon Progo*. Diakses tanggal 10 Oktober 2019, dari Jurnal Prima Edukasia Volume 2 No 2. <https://journal.uny.ac.id>
- Febriani , Dwi Ika. (2012) . *Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Internal Dalam Lingkup Pelayanan Akademik di Universitas Lampung*. Diakses tanggal 16 Januari 2019, dari Jurnal Manajemen Pendidikan. <http://www.neliti.com>
- Hamali, Arif Yusuf . (2018). *Pemahaman Manajemen Sumber Daya Manusia* cetakan ke tiga . Jakarta : CAPS (Center for Academic Publishing Servis)
- Hidayat, Prasetyo dan kawan-kawan. (2015). *Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan Di Smp Negeri 1 Abung Barat Lampung Utara*. Diakses tanggal 10 Oktober 2019, dari Jurnal Manajemen Mutu Pendidikan Volume 3 No 2. <http://jurnal.fkip.unila.ac.id>
- Ikbar Yanuar, (2014). *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Edisi ke dua . Bandung: Refika Aditama
- LPMP Lampung, (2018). *Modul Bimbingan Teknis Fasilitator Daerah Pengembangan Sekolah Model*. Bandar Lampung.
- Moerdiyanto. (2009). *Stategi Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten Kota*. Diakses tanggal 16 Januari 2019, dari Jurnal Informasi Edisi 34 N0 2. <https://journal.uny.ac.id>
- Pidarta, Made. (2014). *Landasan Kependidikan*, Edisi ke tiga. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta
- Presiden. (2005). *Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan*.
- Republik Indonesia, (2003). *Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Santoso, Singgih . (2004). *Buku Latihan SPSS Statistik Multivaruas* Jakarta: Alex Media Komputundo.
- Sudiyono, Anas. (2014). *Pengantar Statistik Pendidikan*. Edisi ke 25 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudjana . (2005). *Metoda Statistika*, Edisi ke enam. Bandung: penerbit Tarsito

Sulaiman, Ahmad, Udik Budi Wibowo, 2016. *Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan di Universitas Gajah Mada*. Diakses tanggal 16 Januari 2019, dari Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan Volume 4 No 1 <http://journal.uny.ac.id>

Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Pendidikan*. Cetakan ke-25: Penerbit Alfabeta Bandung.

Sugiyono, (2018). *Metode Penelitian Evaluasi*. Cetakan ke-1: Penerbit Alfabeta Bandung.

Yanuar Ikbar, (2014). *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Penerbit Refika Aditama Bandung.